



## Analisis Aliansi Amerika Serikat-Taiwan dalam Menghadapi Ancaman Tiongkok Melalui Freedom of Action Theory

Fajar Iqbal Mirza<sup>1</sup>, Syarif Iqbal<sup>2</sup>, Indah Apriana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>LSPR Institute of Communication and Business, Jakarta Pusat 10220, Indonesia

\*Korespondensi: [Fajar.Im@lspr.edu](mailto:Fajar.Im@lspr.edu)

### Info Artikel

Diterima 11  
Oktober 2025

Disetujui 16  
November 2025

Dipublikasikan 30  
November 2025

**Keywords:**  
Aliansi; Freedom of  
Action; Kebijakan  
Luar Negeri;  
Keamanan  
Regional

©2025 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC  
BY-SA 4.0)



### Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika aliansi Amerika Serikat dan Taiwan dalam menghadapi ancaman Tiongkok melalui kerangka teori Freedom of Action yang dikembangkan oleh Michael Beckley. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, didukung oleh wawancara dan riset berbasis internet sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktaksimalan Amerika Serikat dalam memperkuat aliansi bukan merupakan indikasi ketidaktegasan, tetapi strategi sadar untuk mempertahankan fleksibilitas kebijakan luar negeri. Empat variabel utama dalam teori Freedom of Action-loopholes, sidestepping, diversification, dan dual deterrence yang menjelaskan bagaimana Amerika Serikat menjaga ruang gerak strategisnya sekaligus mempertahankan pengaruh terhadap Taiwan tanpa harus membentuk komitmen militer formal. Dalam praktiknya, Amerika Serikat tetap memberikan dukungan signifikan kepada Taiwan melalui penjualan senjata, bantuan peningkatan kapabilitas pertahanan, serta kerja sama teknologi. Namun, AS tetap mempertahankan kebijakan strategic ambiguity untuk mencegah eskalasi dan menghindari konfrontasi langsung dengan Tiongkok. Penelitian ini menegaskan bahwa aliansi informal antara Amerika Serikat dan Taiwan merupakan bentuk adaptasi strategis yang digunakan untuk menghadapi dinamika geopolitik Indo Pasifik yang semakin kompleks.

### Abstract

This study analyzes the dynamics of the United States–Taiwan alliance in responding to China’s growing threats by employing Michael Beckley’s Freedom of Action framework. The research adopts a qualitative case study approach, using interviews and internet-based research as primary data collection techniques. The findings show that the United States’ limited effort to strengthen its alliance with Taiwan is not a result of indecisiveness, but rather a deliberate strategy to maintain flexibility in its foreign policy. The four key variables of the Freedom of Action theory-loopholes, sidestepping, diversification, and dual deterrence, illustrate how the United States preserves strategic maneuverability while sustaining influence over Taiwan without establishing a formal military commitment. In practice, the United States continues to provide substantial support to Taiwan through arms sales, defense assistance, and technological cooperation. Nevertheless, it maintains a policy of strategic ambiguity to reduce escalation risks and avoid direct confrontation with China. This study concludes that the informal nature of the United States–Taiwan alliance represents a strategic

*adaptation designed to navigate the increasingly complex geopolitical landscape of the Indo-Pacific region.*

## 1. Pendahuluan

Negara bertindak sebagai pelaku utama dalam studi hubungan internasional dengan melakukan berbagai langkah demi menjaga kelangsungan hidup dan mencapai kepentingan nasionalnya. Pembentukan aliansi adalah cara negara untuk meningkatkan kekuatan dan bertahan hidup dalam sistem internasional yang penuh ketidakpastian. Menurut Kenneth Waltz, aliansi terjadi ketika kekuatan antara negara-negara utama dalam sistem internasional tidak seimbang. Waltz berpendapat bahwa struktur internasional bersifat anarkis. Bagi Stephen M Walt, aliansi terjadi ketika dua negara merasa terancam secara tidak seimbang, disebut sebagai *balance of threat*. Negara akan memilih apakah bersekutu dengan negara yang menjanjikan keamanan (*balancing*) atau dengan negara yang lebih berpotensi mengancam (*bandwagoning*) (Walt, 1987).

Tidak seperti Waltz yang menekankan keseimbangan kekuatan dalam struktur atau Walt yang fokus pada persepsi ancaman, Snyder melihat aliansi sebagai bentuk kerja sama atau kolaborasi militer untuk menyerang musuh tertentu. Menurut Snyder, menyerang dapat dilakukan dengan cara serangan langsung atau upaya pertahanan diri. Kemudian, Snyder juga mengatakan bahwa aliansi harus berbagi beban dalam persenjataan, bekerja sama dalam militer, dan bersikap saling mendukung (Snyder, 1990:106). Secara global, bentuk aliansi dipengaruhi oleh waktu dan lokasi secara empiris. Saat Perang Dingin, aliansi dibentuk melalui pakta pertahanan. Wilayah Barat yang dikelola oleh Amerika Serikat memiliki pakta pertahanan yaitu NATO dan ANZUS. Sementara di Blok Timur, Pakta Warsawa menjadi pakta pertahanan yang didirikan oleh Uni Soviet (Merill, 2006: 27-37).

Setelah Perang Dingin, Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan super di dunia selama dua dekade. Pada tahun pertama, Amerika Serikat berhasil mengambil alih dominasi dari Uni Soviet dalam politik internasional, membuat struktur internasional berubah dari multipolar ke unipolar. Meskipun demikian, pada abad ke-21 ini, pengaruh Amerika Serikat sebagai negara adidaya tunggal dalam hubungan internasional telah menurun, diikuti dengan berkurangnya kepercayaan dari negara-negara yang dulunya menjadi sekutunya. Menurut Weseley, ini terjadi karena berbagai faktor yang digabungkan. Pertama, upaya Amerika Serikat dalam Perang Melawan terorisme tidak hanya meningkatkan posisinya, tetapi juga menunjukkan batas kekuatan yang dimilikinya. Amerika Serikat tidak berhasil membasmi terorisme di Afganistan. Selanjutnya, krisis keuangan global telah menimbulkan pertanyaan mengenai dominasi Amerika Serikat dalam sistem keuangan global. Munculnya Tiongkok sebagai kekuatan baru di dunia internasional diharapkan memberikan harapan bagi negara-negara lainnya. Beberapa ahli berpikir bahwa Tiongkok akan menjadi pesaing yang lebih kuat daripada Uni Soviet (Wesley, 2017: 6).

Simon Denyer menyatakan bahwa Amerika Serikat ingin membatasi kekuatan dan pengaruh Tiongkok di Asia. Amerika Serikat sedang merencanakan strategi besar di wilayah Indo-Pasifik melalui kebijakan *Free and Open Indo Pacific* (FOIP). Wacana dimulai dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden Trump pada acara *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) di Vietnam pada bulan November 2017. Dalam pidatonya, Trump menjelaskan FOIP sebagai tempat di mana negara-negara

yang merdeka dan berdaulat dapat tumbuh dengan kebebasan dan perdamaian, meskipun memiliki perbedaan budaya dan impian (Gedung Putih, 2017). Menurut Pompeo, Pemerintahan Trump ingin menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai prioritas utama Amerika Serikat melalui FOIP. Amerika Serikat akan fokus pada meningkatkan kerja sama ekonomi dan keamanan di kawasan ini (Departemen Luar Negeri, 2018: 4). Dari strategi tersebut, terlihat Amerika Serikat kembali fokus pada kawasan ini setelah keluar dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

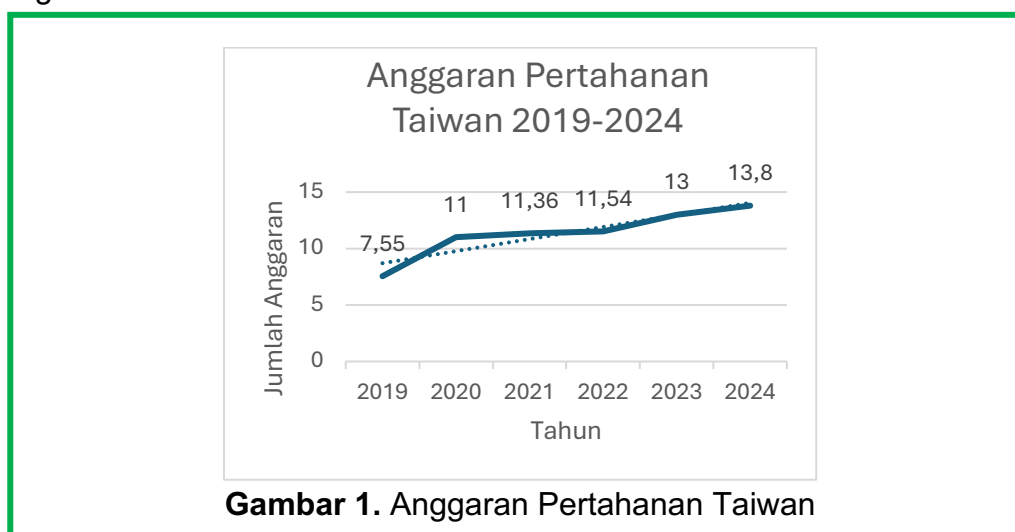
Salah satu negara yang memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat di kawasan Asia adalah Taiwan. Hubungan Amerika Serikat-Taiwan dimulai saat Perang Korea. Saat itu, Amerika Serikat mendukung Korea Selatan, sedangkan Tiongkok membantu Korea Utara. Ini mendorong Amerika Serikat membuat pakta dengan pemerintah Taiwan pada tahun 1954, yang disebut sebagai *Mutual Defense Treaty* (MDT), untuk membantu melindungi mereka dari ancaman Tiongkok. Sejak itu, Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer dan ekonomi yang signifikan kepada Taiwan untuk keamanan, pertahanan, dan pembangunan masa depan mereka.

Hubungan militer antara Taiwan dan AS mengalami perubahan ketika Tiongkok menerapkan kebijakan *One China Policy*. Semua negara mitra Tiongkok harus setuju bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Dalam kebijakan ini, Washington harus memilih apakah akan tetap bermitra resmi dengan Beijing atau mendukung kemerdekaan Taiwan. Hal ini sulit bagi AS karena baik China maupun Taiwan adalah mitra penting. AS di bawah Presiden Jimmy Carter akhirnya memilih memperbarui hubungan dengan Taiwan, terutama dalam kerja sama militer. *US-Taiwan Mutual Defense Treaty* tidak dilanjutkan, tapi diganti dengan *Taiwan Relation Act* (TRA) yang mengatur hubungan antara AS dan Taiwan setelah tahun 1979. Isi perjanjian ini menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah sekutu tak resmi Taiwan yang akan mempertimbangkan berbagai cara untuk mempengaruhi masa depan Taiwan, termasuk tindakan yang mungkin tidak damai seperti boikot atau embargo. Hal ini dapat membahayakan perdamaian dan keamanan di wilayah Pasifik Barat. TRA juga mengatur penjualan senjata AS ke Taiwan yang akan dikurangi secara bertahap. Artinya, AS tidak akan menjual senjata militer ke Taiwan melebihi jumlah yang telah disepakati sebelumnya (Saharani, Rosdiana, 2024). Selain TRA, AS memberikan kepastian keamanan kepada Taiwan melalui *Six Assurance* pada masa Presiden Ronald Reagan pada tahun 1982. Amerika Serikat dan China berunding mengenai penjualan senjata ke Taiwan melalui *Joint Communique*. Dalam enam poin tersebut AS menyatakan bahwa (1) AS tidak sepakat untuk memberikan jangka waktu penghentian penjualan senjata ke Taiwan, (2) AS tidak sepakat untuk berkonsultasi terlebih dahulu ke Tiongkok dalam penjualan persenjataan ke Taiwan, (3) AS tidak akan memainkan peranan sebagai mediator antara Tiongkok dan Taiwan, (4) AS tidak sepakat untuk merevisi *Taiwan Relations Act*, (5) AS tidak akan mengubah posisinya terkait kedaulatan Taiwan, (6) AS tidak akan menggunakan tekanan kepada Taiwan untuk bernegosiasi dengan Tiongkok (FAPA.Org, 2023).

Tahun 2020, Kongres AS menyetujui dan menandatangani *Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act* (TAIPEI Act). Undang-undang ini menegaskan dukungan AS terhadap aliansi diplomatik Taiwan di berbagai negara dan partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional. Kemudian, pemerintah AS menandatangani *National Defense Authorization Act* (NDAA) untuk tahun 2023-2024. Hukum tersebut mencakup kebijakan dan inisiatif untuk

membantu Taiwan dalam meningkatkan kemampuan pertahanan diri dan berperan penting dalam menjaga keamanan regional. Saat Taiwan dan AS terus bekerja sama, kemitraan mereka menjadi salah satu bentuk kerja sama global.

Tiongkok juga semakin agresif dalam mengerahkan kekuatan militernya yang mengancam Taiwan. Pada Mei 2024 Taiwan mendeteksi pergerakan 21 jet tempur Tiongkok dan 15 kapal *coast guard* Tiongkok beroperasi di dekat wilayah Taiwan (CNBCIndonesia.com, 2024). Pada bulan Oktober 2024, Tiongkok melaksanakan latihan militer dengan mengerahkan 153 pesawat dan 26 kapal yang terdiri dari 14 kapal Angkatan laut dan 12 kapal *coast guard* Tiongkok. Pengerahan ini tercatat memecahkan rekor pengerahan militer terbanyak yang dilakukan oleh Tiongkok disekitar selat Taiwan. Dalam merespon agresifitas dari militer Tiongkok, Taiwan meningkatkan anggaran pertahanannya. Tahun 2019, Taiwan memiliki anggaran pertahanan sampai USD \$7.55 miliar. Pada 2020, anggarannya meningkat menjadi USD \$11 miliar. Tahun 2021, terjadi peningkatan kembali hingga mencapai USD \$11.36 miliar. Peningkatan ini terjadi hingga pada tahun 2024. Tahun 2022 sebesar USD \$11.54 miliar, tahun 2023 sebesar USD \$13 miliar, dan tahun 2024 sebesar USD \$13.8 miliar. Berikut anggaran pertahanan Taiwan tahun 2019-2024 dalam bentuk grafik:



**Gambar 1.** Anggaran Pertahanan Taiwan

Sumber: telah diolah kembali

Anggaran pertahanan yang meningkat menunjukkan keseriusan Taiwan dalam menghadapi ancaman nyata dari Tiongkok. Meskipun demikian, kapabilitas militer yang dimiliki oleh Taiwan masih sangat jauh dari kapabilitas militer Tiongkok. Berikut perbandingan kapabilitas militer yang dimiliki oleh Taiwan dan Tiongkok:

**Tabel 1.** Perbandingan kapabilitas militer yang dimiliki oleh Taiwan dan Tiongkok

Jumlah Personel	China	Taiwan
Angkatan Darat	965.000	88.000 personel
Angkatan Laut	260.000	40.000 kapal
Angkatan Udara	395.000	35.000 pesawat
Angkatan Rudal Strategis	120.000	0
Angkatan Dukungan Strategis	145.000	0
Angkatan Lain	150.000	0
Total	2.035.000	163.000

(Sumber: The Military Balance, IIS)

Sisi personel setiap matra yang dimiliki kedua belah pihak terlihat bahwasannya Tiongkok masih sangat unggul dibandingkan Taiwan. Dari sisi kekuatan alat tempur militer, Tiongkok memiliki armada jauh lebih besar dari Taiwan. Armada laut Tiongkok terdiri dari 86 kapal angkatan laut dan 59 kapal selam, sedangkan Taiwan mengoperasikan 26 kapal angkatan laut dan hanya empat kapal selam. Dalam hal kekuatan udara, China melebihi Taiwan dengan lebih dari 2.921 pesawat tempur, termasuk J-20. Taipei dilaporkan memiliki 744 pesawat di gudang senjatanya. Tiongkok memiliki 4.800 tank, sementara Taiwan hanya memiliki 650 tank untuk bertahan melawan. Dalam hal artileri gerak sendiri, armada Tiongkok berjumlah 9.550 dibandingkan dengan Taiwan yang berjumlah 2.093.

Perbandingan kekuatan militer ini menunjukkan bahwa meskipun Taiwan sudah meningkatkan anggaran pertahanannya dan juga Amerika Serikat menambah bantuan pertahanannya kepada Taiwan, namun keamanan Taiwan masih sangat rawan. Keamanan Taiwan sangatlah bergantung pada komitmen dan bantuan Amerika Serikat jika Tiongkok suatu waktu menyerang Taiwan. Secara historis aliansi Amerika Serikat-Taiwan sudah terbentuk cukup lama dari tahun 1954 melalui *Mutual Defense Treaty* (MDT). Namun demikian terjadi perubahan hubungan keduanya setelah sejak tahun 1971 Presiden Amerika Serikat secara tidak langsung mengakui *one china policy* untuk mendekatkan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1979, MDT antara Amerika Serikat dan Taiwan pun dihapus dan digantikan dengan *Taiwan Relations Act* (TRA). TRA memosisikan hubungan antara AS dan Taiwan sebagai aliansi tidak resmi. Hal ini menunjukkan bahwa AS tetap ingin memelihara hubungan dengan Taiwan. Bahkan AS juga mengeluarkan six assurances untuk memastikan keamanan Taiwan dari ancaman Tiongkok.

Pasca perang dingin, AS melihat peningkatan kekuatan Tiongkok sebagai ancaman baru. Pada tahun 2011 AS menaruh fokusnya untuk meredam kekuatan dan pengaruh Tiongkok di Asia melalui kebijakan *Pivot to Asia*. Keseriusan AS dalam menghadapi Tiongkok tambah terlihat dengan kebijakan *Free and Open Indo Pacific* (FOIP). AS memberikan perhatian lebih kepada aliansi-aliansinya dengan memberikan peningkatan bantuan militer, termasuk Taiwan. Secara ideal bantuan AS terhadap Taiwan sememstinya bisa menyeimbangkan dan memberikan rasa aman bagi Taiwan dalam menghadapi ancaman Tiongkok. Namun demikian, kenyataannya masih belum cukup dalam menghadapi ancaman dari Tiongkok. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan kapabilitas militer antara Tiongkok dan Taiwan. Apalagi Biden sempat memberikan penegasan pada tahun 2024 bahwasannya AS tidak akan mendukung kemerdekaan Taiwan. Hal ini menunjukkan posisi AS sebagai aliansi terkesan ambigu dalam mendukung Taiwan. Lebih lanjut tidak ada klausul dalam TRA yang memastikan AS akan membantu Taiwan jika Tiongkok menyerangnya. Dengan demikian pertanyaan penelitiannya adalah mengapa Amerika Serikat tidak maksimal dalam memperkuat hubungan aliansi dengan Taiwan dalam menghadapi ancaman Tiongkok?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Lamont penelitian kualitatif merupakan koleksi data dan analisis data non-numerik. (Lamont, 2015:78). Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi dan fokus pada pemaknaan serta proses yang membentuk politik internasional. Penelitian kualitatif seringkali dilakukan dengan studi mendalam terhadap fenomena, negara, organisasi atau

individu spesifik sehingga penelitian kualitatif dalam hubungan internasional biasanya menggunakan pendekatan studi kasus (Lamont, 2015).

Pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif didefinisikan sebagai *qualitative small-n research* (Lamont, 2015; Blatter & Haverland, 2012). Blatter dan Haverland menyatakan bahwa pendekatan studi kasus memiliki tujuan untuk menunjukkan relasi antara pengamatan empiris yang konkrit dengan konsep-konsep teoretis yang abstrak (Blatter & Haverland, 2012). Penelitian ini menggunakan studi kasus tentang lemahnya aliansi tidak resmi antara Amerika Serikat dan Taiwan dalam menghadapi ancaman dari Tiongkok. Pengamatan empiris direlasikan dengan indikator dan subindikator yang terdapat dalam variabel-variabel teori kebebasan tindakan untuk menganalisis fenomena tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan penelitian berbasis internet (*internet-based research*). Format ini lazim digunakan dalam penelitian yang melibatkan aktor atau elit politik karena mampu menangkap nuansa argumentasi dan pertimbangan strategis yang tidak selalu muncul dalam format wawancara terstruktur (Lamont, 2015:84). Sementara itu, penelitian berbasis internet digunakan untuk mengumpulkan dokumen resmi, laporan kebijakan, artikel akademik, pernyataan pemerintah, serta database digital yang relevan dengan isu aliansi Amerika Serikat–Taiwan. Kombinasi kedua teknik ini memberikan data yang komprehensif, baik dari perspektif empiris melalui wawancara maupun dari perspektif dokumenter melalui sumber daring yang kredibel. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang dipilih mendukung analisis mendalam terhadap strategi dan dinamika aliansi dalam konteks ancaman geopolitik kontemporer.

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah penelitian berbasis internet (*internet-based research*) melalui website resmi pemerintahan, berita online, jurnal online, dan lainnya (Lamont, 2015: 87-88). Penelitian berbasis internet dapat dilakukan karena pemerintah banyak menggunakan media resmi untuk menyampaikan pernyataan resmi yang dapat menjadi sumber-sumber kredibel. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah *Causal Process Tracing* (CPT). CPT merupakan pendekatan analitis yang memiliki dua komponen utama, yaitu pemikiran konfiguratif dan konfigurasi kausal (Blatter & Haverland, 2012). CPT memfokuskan analisis kita kepada penyebab kausal apa yang menghasilkan peristiwa Y.

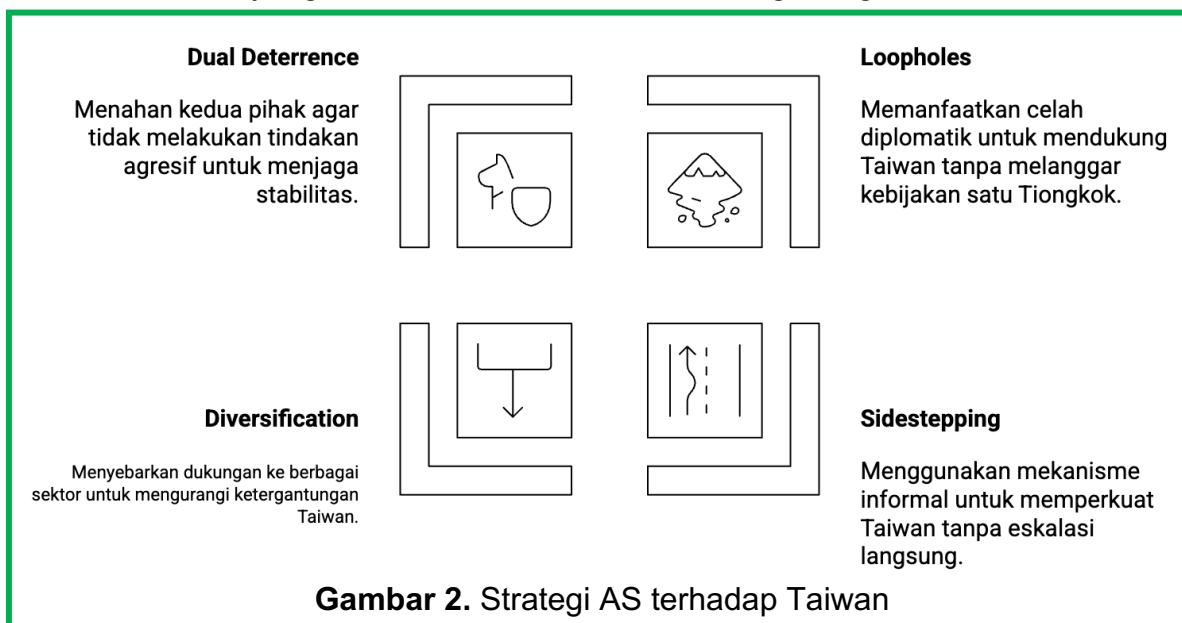
### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Hasil**

##### **Hubungan AS–Taiwan dalam Kerangka *Freedom of Action Theory***

Hubungan Amerika Serikat dan Taiwan merupakan studi kasus yang sangat relevan untuk memahami bagaimana sebuah negara besar menerapkan strategi fleksibel dalam menjaga kepentingan nasionalnya tanpa terikat pada perjanjian aliansi formal. Di tengah dinamika keamanan Indo Pasifik, hubungan ini mencerminkan praktik politik luar negeri yang memadukan dukungan substantif dengan perhitungan strategis yang penuh kehati-hatian. Fleksibilitas tersebut memungkinkan Amerika Serikat mempertahankan pengaruh terhadap Taiwan, sekaligus menghindari konsekuensi politik dan militer yang mungkin muncul apabila hubungan keduanya diformalkan dalam bentuk aliansi tradisional. Dalam kerangka *Freedom of Action Theory* oleh Beckley edisi tahun dua ribu tujuh belas, terdapat

empat variabel utama yang membantu menjelaskan pola perilaku Amerika Serikat. Keempat variabel tersebut adalah loopholes, sidestepping, diversification, dan dual deterrence. Teori ini berfokus pada bagaimana negara besar menjaga ruang gerak strategis agar tidak terjebak dalam komitmen yang dapat membatasi pilihan kebijakan luar negeri. Dengan demikian, teori ini memberikan perspektif analitis yang kuat dalam memahami pendekatan Amerika Serikat terhadap Taiwan sebagai mitra keamanan yang tidak diakui secara formal sebagai negara berdaulat.



Empat strategi utama Amerika Serikat dalam mempertahankan fleksibilitas kebijakan luar negeri terhadap Taiwan berdasarkan kerangka Freedom of Action Theory. Pertama, konsep loopholes menunjukkan cara Amerika Serikat memanfaatkan celah diplomatik yang memungkinkan mereka tetap memberikan dukungan kepada Taiwan tanpa melanggar kebijakan satu Tiongkok. Kedua, strategi sidestepping menggambarkan penggunaan mekanisme informal seperti dialog teknis, kerja sama intelijen, dan pelatihan militer terbatas untuk memperkuat posisi Taiwan tanpa memicu eskalasi langsung dengan Tiongkok. Ketiga, diversification menekankan penyebaran bantuan dan kerja sama ke berbagai sektor, termasuk ekonomi, teknologi, dan pertahanan, sehingga ketergantungan Taiwan tidak hanya bertumpu pada dukungan militer. Keempat, dual deterrence menunjukkan upaya Amerika Serikat menahan kedua pihak, yaitu Taiwan dan Tiongkok, agar tidak melakukan tindakan agresif yang berpotensi memicu konflik besar. Secara keseluruhan, keempat strategi ini membentuk pendekatan fleksibel yang memungkinkan Amerika Serikat mempertahankan pengaruh di kawasan Indo Pasifik sambil menghindari keterikatan pada aliansi resmi yang dapat membatasi ruang gerak diplomatiknya.

### Celah Perjanjian Kerja Sama Amerika Serikat -Taiwan

Kerangka Freedom of Action Theory yang dikembangkan oleh Michael Beckley, konsep loopholes merujuk pada keberadaan celah legal, ambiguitas perjanjian, atau formulasi yang tidak eksplisit dalam struktur hubungan aliansi antara negara besar dan sekutunya. Loopholes ini menjadi sarana bagi negara besar seperti Amerika Serikat (AS) untuk menghindari komitmen militer yang mengikat, sambil tetap mempertahankan pengaruh strategis terhadap pihak sekutu. Dalam

konteks hubungan AS dan Taiwan, keberadaan loopholes menjadi sangat menonjol setelah berakhirnya perjanjian pertahanan resmi mereka pada tahun 1979.

Aliansi formal antara AS dan Taiwan pertama kali terbentuk melalui Mutual Defense Treaty (MDT) pada tahun 1954, sebagai bagian dari strategi containment selama Perang Dingin untuk membendung pengaruh komunis Tiongkok. Namun, perubahan kebijakan luar negeri AS pada awal 1970-an, yang ditandai dengan pembukaan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui kunjungan Nixon ke Beijing dan Resolusi Majelis Umum PBB 2758 (1971), mendorong AS untuk membatalkan MDT dengan Taiwan. Sejak tahun 1979, AS secara resmi mengakui RRT sebagai satu-satunya pemerintah sah dari Tiongkok dan membatalkan MDT sebagai implikasinya (Diyanto, 2024). Sebagai gantinya, Kongres AS mengesahkan Taiwan Relations Act (TRA), sebuah undang-undang domestik yang mengatur hubungan informal dengan Taiwan. TRA secara eksplisit menyatakan bahwa AS akan "menyediakan senjata defensif kepada Taiwan" dan "mempertahankan kapasitas untuk menolak penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk koersi lain terhadap Taiwan" (U.S. Congress, 1979, §2(b)(4)). Namun, tidak ada pasal dalam TRA yang mewajibkan AS untuk melakukan intervensi militer jika Taiwan diserang. Celah inilah yang dimanfaatkan sebagai loophole legal, memungkinkan AS mendukung Taiwan tanpa keterikatan operasional atau militer langsung.

Keberadaan loopholes ini semakin diperjelas dengan dikeluarkannya Six Assurances oleh pemerintahan Reagan pada 1982. Dalam dokumen tersebut, AS menegaskan bahwa tidak akan: (1) menetapkan tanggal akhir untuk penjualan senjata ke Taiwan, (2) melakukan konsultasi dengan Tiongkok terkait penjualan senjata ke Taiwan, (3) menjadi mediator antara Taiwan dan Tiongkok, (4) memaksa Taiwan untuk bernegosiasi, (5) mengubah posisi atas kedaulatan Taiwan, dan (6) merevisi TRA (FAPA, 2023). Keenam jaminan tersebut memperkuat posisi AS sebagai pelindung tidak resmi Taiwan, namun tetap tanpa tanggung jawab yang bersifat perjanjian militer formal.

Penting untuk dicatat bahwa praktik loopholes ini masih diterapkan dalam kebijakan-kebijakan terbaru AS, termasuk dalam National Defense Authorization Act (NDAA) 2023–2024. NDAA memuat berbagai ketentuan tentang peningkatan kerja sama pertahanan, pelatihan militer, bantuan siber, dan interoperabilitas dengan Taiwan (lihat SEC. 1309, 1518). Namun, seluruh dukungan ini tetap berada dalam kerangka non-perjanjian, bersifat defensif, dan tidak menyatakan secara eksplisit bahwa AS akan membela Taiwan jika terjadi invasi dari Tiongkok (USTaiwanDefense, 2024). Bagi AS, loopholes bukanlah bentuk ketidaktegasan, tetapi strategi sadar yang memberikan ruang fleksibilitas dalam kebijakan luar negeri. Menurut Beckley (2017), negara besar secara aktif menghindari perjanjian eksplisit karena khawatir terbebani oleh "liability alliance" atau komitmen pertahanan yang bisa menjerat mereka dalam konflik yang tidak sejalan dengan kepentingan vital nasional. Dalam kasus Taiwan, ketidakseimbangan kekuatan militer dengan Tiongkok dan risiko eskalasi regional menjadikan fleksibilitas sebagai kebutuhan strategis. Dengan demikian, keberadaan loopholes dalam hubungan AS–Taiwan, baik dalam bentuk TRA, Six Assurances, maupun NDAA, mencerminkan strategi jangka panjang AS untuk mempertahankan pengaruh tanpa komitmen militer mutlak. Ini memungkinkan AS menjaga status quo di Selat Taiwan, membendung

ekspansi Tiongkok, dan tetap memiliki ruang manuver strategis tanpa kehilangan kredibilitas politik di mata sekutunya.

### **Sidestepping dalam Hubungan AS–Taiwan**

Variabel kedua dalam Freedom of Action Theory adalah sidestepping, yang berarti strategi menghindari keterlibatan langsung dalam konflik atau komitmen formal yang bersifat mengikat. Negara besar seperti Amerika Serikat (AS) menerapkan sidestepping sebagai cara untuk menghindari kewajiban militer yang dapat membatasi fleksibilitas strategis mereka, sekaligus tetap mempertahankan pengaruh terhadap negara sekutu yang berada dalam posisi rawan. Dalam konteks hubungan AS dan Taiwan, sidestepping dilakukan melalui kombinasi kebijakan diplomatik, militer, dan hukum yang menempatkan AS dalam posisi "supporter tidak resmi" tanpa harus menjadi "pelindung eksplisit".

Bentuk sidestepping paling awal terlihat dari keberadaan American Institute in Taiwan (AIT), sebuah entitas semi-pemerintah yang didirikan pada tahun 1979 untuk menjalankan fungsi diplomatik AS di Taiwan tanpa mendirikan kedutaan resmi. AIT dirancang untuk menjaga hubungan erat dengan pemerintah Taiwan, termasuk dalam bidang ekonomi, budaya, dan keamanan, tetapi tidak berstatus sebagai perwakilan diplomatik formal. Dengan demikian, AS secara teknis tetap mematuhi prinsip One China Policy tanpa benar-benar memutuskan hubungan fungsional dengan Taiwan (Clough, 1999). Selain itu, sidestepping dilakukan secara konsisten dalam pernyataan politik tingkat tinggi. Misalnya, dalam beberapa kesempatan publik tahun 2022 dan 2023, Presiden Joe Biden menyatakan bahwa AS “akan membantu Taiwan jika diserang” (Reuters, 2022). Namun, pernyataan tersebut segera diklarifikasi oleh Gedung Putih bahwa tidak ada perubahan dalam kebijakan resmi AS, yaitu *strategic ambiguity*. Pernyataan ini adalah bentuk sidestepping komunikasi, mengirim sinyal pencegahan kepada Tiongkok tanpa menciptakan komitmen operasional. Hal ini memperkuat argumen bahwa AS menggunakan ambiguitas sebagai alat untuk menjaga kontrol atas eskalasi (Diyanto, 2024).

Aspek kebijakan pertahanan, sidestepping terlihat dalam berbagai program bantuan militer dan kerja sama keamanan yang dirancang dengan hati-hati agar tidak melanggar batas formalitas. Dalam National Defense Authorization Act (NDAA) 2024, AS menyetujui bantuan pertahanan kepada Taiwan, termasuk pelatihan militer, interoperabilitas, keamanan siber, dan modernisasi sistem pertahanan. Namun, semua bentuk bantuan ini bersifat tidak mengikat secara perjanjian dan diformulasikan sebagai bentuk peningkatan kapasitas, bukan komitmen intervensi langsung (U.S. Congress, 2024, SEC. 1309 & 1518).

Sidestepping juga menjadi instrumen utama dalam pengelolaan respons terhadap dinamika konflik di Selat Taiwan. Misalnya, ketika Tiongkok meningkatkan latihan militer dan pelanggaran wilayah udara Taiwan, AS memilih merespons melalui latihan kebebasan navigasi dan peningkatan kerja sama militer dengan sekutu di Indo-Pasifik, seperti Jepang, Filipina, dan Australia, bukan dengan pengerahan langsung pasukan AS ke wilayah Taiwan (Green, 2023). Strategi ini memungkinkan AS memberi tekanan kepada Tiongkok tanpa terlibat dalam konfrontasi terbuka. Dalam konteks ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan, menurut ahli hubungan Internasional dari Universitas Indonsia, Yandry Kurniawan, Phd. “AS secara strategis menerapkan sidestepping untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingannya sambil mengelola risiko yang melekat. Kepentingan

AS memengaruhi strategi sidestepping-nya". Setidaknya ada dua kepentingan penting AS di kawasan Asia-Pasifik yang secara langsung membentuk pendekatan sidestepping-nya terhadap isu Taiwan"

"Pertama, menahan Pengaruh Tiongkok di Asia. AS melihat kebangkitan Tiongkok yang cepat, baik secara ekonomi maupun militer, sebagai ancaman terhadap status quo dominasi globalnya. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar bagi lebih dari 128 negara dan merupakan sumber utama investasi asing langsung serta pembiayaan infrastruktur global. Pertumbuhan kekuatan Tiongkok ini memunculkan kekhawatiran AS akan potensi Tiongkok menjadi negara adidaya yang menyaingi hegemoni global AS. Konflik militer langsung dengan Tiongkok, terutama di Selat Taiwan, berpotensi menjadi perang berskala besar dengan konsekuensi ekonomi global yang tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, AS berupaya menahan pengaruh Tiongkok, namun dengan cara yang meminimalkan risiko konfrontasi langsung."

"Kedua, AS ingin memperkuat pengaruh di Kawasan Indo-Pasifik. Stabilitas di Indo-Pasifik sangat penting bagi kepentingan keamanan dan ekonomi AS. Taiwan dianggap sebagai "mata rantai utama dalam rangkaian pulau pertama" yang strategis, membentang dari Jepang hingga Filipina dan Laut Cina Selatan. Jika Tiongkok berhasil menguasai Taiwan, kemampuan Tiongkok untuk memproyeksikan kekuatan militer secara global akan meningkat secara signifikan, dan pada saat yang sama, kemampuan AS untuk melindungi sekutunya di kawasan tersebut akan sangat terganggu. Kebijakan AS seperti "Pivot to Asia" (era Obama) dan "Free and Open Indo Pacific (FOIP)" (era Trump dan Biden) mencerminkan fokus AS untuk mengonsolidasikan dan memperkuat kepemimpinannya di kawasan, seringkali melalui kerja sama multilateral untuk membendung Tiongkok." (Yandry Kurniawan, wawancara pribadi, 2025). Meskipun kepentingan vital ini mendasari dukungan AS terhadap Taiwan, potensi kerugian yang sangat besar dari komitmen aliansi yang lebih kuat atau intervensi militer langsung memaksa AS untuk melakukan "sidestepping". menurut Yandry Kurniawan sidestepping dilakukan dikarenakan juga cost analysis dari dampak potensi risiko jika AS terlibat secara langsung.

"Bagaimanapun retorika yang digunakan Tiongkok dan Amerika Serikat, kita harus memahami hubungan antara mereka lebih sebagai 'formidable competitor,' bukan 'enemy.' Artinya, bagi Amerika Serikat Tiongkok merupakan negara yang memberikan tantangan signifikan dalam lingkungan strategis global kontemporer yang cenderung multipolar, setelah sekitar 30 tahun sejak berakhirnya Perang Dingin yang cenderung unipolar. Ekonomi Amerika Serikat masih sekian kali lebih besar dari ekonomi Tiongkok. Artinya, Amerika Serikat masih menjadi potensi pembeli terbesar dari produk-produk Tiongkok karena uang mereka masih yang paling banyak di dunia. Di sisi lain, banyak produk Tiongkok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Amerika dan akan sangat mahal sekali jika diproduksi di Amerika. Oleh karena itu, pecah dan bereskalasinya konflik di Selat Taiwan bukan merupakan kepentingan nasional bagi Tiongkok dan Amerika Serikat. Dan ini sudah diterangkan dalam banyak literatur klasik mengenai dilema aliansi, dimana resiko bagi negara besar adalah terperangkap dalam konflik mitra aliansi yang lebih lemah (fear of entrapment). Setelah terperangkap dengan perang lawan teror di Timur Tengah sekitar 20 tahun, eskalasi konflik Hamas-Israel, dan Perang Iran-Israel; terlibat dalam konflik baru di Asia Timur benar-benar bukan merupakan kepentingan

nasional bagi Amerika. Sangat susah bagi kita membayangkan Amerika akan membuat luka ekonomi baru, seperti membiayai operasi militer di Selat Taiwan, di saat kondisi ekonomi global yang tidak menentu seperti saat ini. (Yandry Kurniawan, wawancara pribadi, 2025).”

Menurut Beckley (2017), sidestepping bukan hanya penghindaran pasif, melainkan merupakan bagian dari strategi proaktif untuk menjaga freedom of action. Negara besar akan selalu berupaya menjaga jalur-jalur keterlibatan terbuka tanpa membatasi diri dengan komitmen yang berisiko tinggi secara politik, ekonomi, dan militer (Beckley, 2017). Dalam kasus Taiwan, risiko konflik terbuka dengan Tiongkok bukan hanya akan melibatkan AS secara militer, tetapi juga akan mengguncang rantai pasok global, terutama dalam sektor strategis seperti semikonduktor (Shih et al., 2021). Dengan demikian, sidestepping dalam hubungan AS–Taiwan adalah instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara deterrence terhadap Tiongkok dan penghindaran dari komitmen formal terhadap Taiwan. Strategi ini memungkinkan AS untuk mempertahankan kehadiran strategis di kawasan Indo-Pasifik, membela nilai-nilai demokrasi dan stabilitas, tanpa harus mengorbankan fleksibilitas kebijakan luar negerinya.

### **Diversifikasi oleh Amerika Serikat terhadap Taiwan: Alternatif Aliansi dalam Bingkai Kebebasan Bertindak**

Amerika Serikat tidak membangun aliansi militer resmi dengan Taiwan, tetapi justru menerapkan strategi diversifikasi yang luas dan sistematis untuk mempertahankan hubungan keamanan, ekonomi, dan diplomatik dengan mitra strategis tersebut. Diversifikasi, dalam kerangka Freedom of Action Theory oleh Beckley (2017), berfungsi sebagai cara bagi negara besar seperti AS untuk menjaga pengaruh dan dukungan terhadap sekutunya tanpa harus terikat dalam komitmen pertahanan eksplisit yang dapat membatasi fleksibilitas kebijakan luar negeri.

Tidak seperti hubungan AS dengan NATO, Jepang, atau Korea Selatan, yang dibingkai dalam perjanjian pertahanan formal dengan klausul keamanan kolektif, hubungan AS dengan Taiwan didasarkan pada Taiwan Relations Act (TRA) tahun 1979, sebuah produk hukum domestik AS, bukan traktat internasional. TRA menyatakan bahwa AS akan membantu menyediakan perlengkapan pertahanan kepada Taiwan dan menjaga kapasitas untuk merespons setiap upaya penggunaan kekuatan terhadap Taiwan, namun tidak mewajibkan intervensi militer secara otomatis (Taiwan Relations Act, 1979). Ketidakhadiran klausul seperti Pasal 5 dalam North Atlantic Treaty atau komitmen eksplisit sebagaimana dalam U.S.–Japan Security Treaty menegaskan bahwa hubungan ini dirancang untuk tetap tidak mengikat secara hukum internasional.

Praktiknya, AS melakukan diversifikasi bentuk dukungan kepada Taiwan dalam tiga ranah utama: militer, ekonomi-strategis, dan diplomatik. Di sektor militer, AS memperkuat kapasitas pertahanan Taiwan melalui program Foreign Military Sales (FMS). Sejak 2019, Taiwan telah menerima berbagai sistem senjata mutakhir dari AS, termasuk jet tempur F-16V, sistem rudal Patriot, dan drone MQ-9B. Semua transaksi ini dilakukan di bawah kerangka non-aliansi, memungkinkan Washington mengontrol volume dan waktu bantuan tanpa kewajiban permanen (Forum on the Arms Trade, 2024). Selain itu, AS memperluas kerja sama keamanan siber dan interoperabilitas melalui National Defense Authorization Act (NDAA) 2023–2024, yang menginstruksikan pelatihan militer bersama dan penguatan sistem pertahanan

sipil Taiwan (U.S. Congress, 2024). Namun, NDAA dengan tegas tidak menciptakan kewajiban pertahanan kolektif. Bentuk dukungan ini menunjukkan bahwa AS tetap menjaga keterlibatan, tetapi dalam format yang tidak mengarah pada keterikatan militer langsung seperti yang ada di Jepang atau Korea Selatan, di mana ribuan personel militer AS ditempatkan secara permanen.

Diversifikasi juga mencakup dimensi ekonomi dan teknologi. Proyek pembangunan dua pabrik chip canggih oleh Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) di Arizona senilai lebih dari USD \$40 miliar memperkuat interdependensi antara sektor strategis AS dan Taiwan (U.S. Department of Commerce, 2023). Dengan menjadikan Taiwan sebagai pemasok kritis semikonduktor, AS menciptakan keterkaitan strategis yang tidak bergantung pada ikatan militer, tetapi menghasilkan insentif bagi stabilitas hubungan bilateral. Dalam diplomasi, AS mendorong legislasi seperti Taiwan Assurance Act dan Taipei Act untuk memperluas partisipasi internasional Taiwan tanpa perlu mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat secara resmi. AS juga mendorong sekutu seperti Jepang, Australia, dan negara-negara Eropa untuk memperkuat kerja sama non-diplomatik dengan Taiwan melalui forum seperti Quad, meskipun Taiwan bukan anggota resmi (Ward & McLeary, 2021).

Absennya hubungan diplomatik formal dan penempatan pasukan AS di Taiwan bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari desain strategis. Tidak seperti Jepang atau Korea Selatan yang menjadi bagian dari struktur komando gabungan, Taiwan tidak memiliki status demikian. Hal ini mencegah AS dari keterlibatan otomatis jika konflik terjadi, sekaligus menjaga ruang diplomatik dengan Tiongkok tetap terbuka. Diversifikasi ini memungkinkan AS menjalankan kebijakan *strategic ambiguity* secara efektif, mencegah Tiongkok melakukan agresi terhadap Taiwan. Melalui kerangka ini, AS mempertahankan pengaruhnya di Asia Timur tanpa kehilangan kebebasan bertindak. Dengan kata lain, dibanding membentuk aliansi formal, diversifikasi menjadi instrumen strategis utama AS dalam mengelola risiko, menahan eskalasi, dan menjaga stabilitas regional.

### **Dual Deterrence: Menjaga Status Quo dalam Ketegangan Tiga Arah**

Strategi dual deterrence merupakan inti dari pendekatan Amerika Serikat (AS) dalam menjaga stabilitas kawasan Selat Taiwan. Konsep ini mengacu pada kemampuan negara besar untuk secara bersamaan menahan sekutunya agar tidak bertindak provokatif (*restraining the ally*), sekaligus mencegah musuh agar tidak melancarkan agresi (*detering the adversary*) (Beckley, 2017). Dalam konteks AS–Taiwan–Tiongkok, strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan ambiguitas strategis (*strategic ambiguity*) dan penyeimbangan kekuatan (*balancing*) yang cermat agar tidak memicu konflik terbuka.

Sejak 2016, ketegangan antara Taiwan dan Tiongkok meningkat signifikan seiring terpilihnya Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang dikenal pro-kemerdekaan. Tiongkok, melalui aktivitas militer yang agresif, telah meningkatkan tekanan terhadap Taiwan. Data menunjukkan lebih dari 1.700 pelanggaran zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) oleh jet tempur Tiongkok sepanjang 2023, naik drastis dibandingkan 380 pelanggaran pada 2020 (BBC News, 2021; Focus Taiwan, 2023). Eskalasi ini memicu kekhawatiran global dan menempatkan AS dalam dilema strategis. Sebagai bentuk *detering the adversary*, AS meningkatkan dukungan militer kepada Taiwan. Melalui Taiwan Relations Act

(TRA), AS telah menyediakan penjualan senjata senilai lebih dari USD 25 miliar antara 2017–2023. Ini mencakup rudal anti-kapal Harpoon, sistem pertahanan udara Patriot, HIMARS, drone MQ-9, hingga F-16 Viper Block 70 (Forum on the Arms Trade, 2024). Dalam National Defense Authorization Act (NDAA) 2023 dan 2024, Kongres AS menyetujui perluasan kerja sama militer dengan Taiwan termasuk pelatihan bersama, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas pertahanan siber (U.S. Department of Defense, 2023).

Langkah ini selalu dibarengi dengan upaya menahan Taiwan agar tidak bergerak menuju kemerdekaan formal. Biden, dalam berbagai pernyataan publik dan melalui saluran diplomatik, menegaskan bahwa AS tidak mendukung kemerdekaan Taiwan. Meski beberapa kali Biden menyatakan bahwa AS akan membela Taiwan jika diserang, Gedung Putih segera mengklarifikasi bahwa kebijakan *strategic ambiguity* tetap berlaku (Lindsay, 2022). Dengan demikian, AS berupaya menjaga Taiwan dalam batas "provokasi yang terkalkulasi", tanpa mendorong ke arah deklarasi kedaulatan yang eksplisit, karena hal itu akan menjadi pemicu perang langsung dengan Tiongkok. Kebijakan ini juga diperkuat oleh Six Assurances tahun 1982 yang masih berlaku, salah satunya menyatakan bahwa AS tidak akan menekan Taiwan untuk bernegosiasi dengan Tiongkok atau mengubah status kenegaraan secara sepihak. AS juga menghindari penempatan pasukan permanen di Taiwan, berbeda dengan Jepang dan Korea Selatan, di mana pasukan AS hadir sebagai bagian dari perjanjian pertahanan kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa AS tetap ingin menghindari keterikatan langsung yang dapat memicu kewajiban militer secara otomatis. Secara regional, AS juga melakukan penyeimbangan lewat keterlibatan dengan negara-negara sekutu. Dalam kerangka kerja sama seperti *Quadilateral Security Dialogue* (Quad) dan AUKUS, AS memperkuat kehadiran militernya di Indo-Pasifik untuk mengirim sinyal bahwa setiap ancaman terhadap status quo di Selat Taiwan akan memiliki konsekuensi strategis. Di sisi lain, upaya ini juga bertujuan memperluas tekanan terhadap Tiongkok tanpa mengharuskan AS melibatkan diri langsung dalam konflik bersenjata.

Strategi *dual deterrence*, AS mempertahankan kendali atas eskalasi di Selat Taiwan. Ini adalah tindakan sadar untuk menjaga status quo tanpa memihak secara terbuka. Taiwan mendapatkan bantuan pertahanan yang signifikan, tetapi tetap berada dalam kendali strategis AS agar tidak menjadi pemicu konflik. Sementara itu, Tiongkok disadarkan bahwa agresi militer terhadap Taiwan akan berujung pada reaksi keras dari AS dan komunitas internasional. Kebijakan ini menunjukkan kompleksitas dalam mengelola hubungan aliansi tidak resmi dengan tingkat sensitivitas geopolitik yang sangat tinggi.

### **3.2 Pembahasan**

Pembahasan mengenai hubungan Amerika Serikat dan Taiwan dalam kerangka *Freedom of Action Theory* menunjukkan bahwa strategi fleksibel yang diterapkan Amerika Serikat bukan merupakan tanda keraguan, melainkan pilihan rasional untuk mempertahankan ruang gerak strategis sambil menyeimbangkan dukungan kepada Taiwan dan menghindari konfrontasi langsung dengan Tiongkok. Melalui empat variabel yang dijelaskan Beckley yaitu *loopholes*, *sidestepping*, *diversification*, dan *dual deterrence*, Amerika Serikat membangun bentuk kemitraan strategis tidak resmi yang memungkinkan terciptanya hubungan keamanan substantif tanpa komitmen pertahanan formal. *Loopholes* memberi dasar legal bagi dukungan melalui *Taiwan Relations Act*, *sidestepping* memungkinkan perluasan

kerja sama informal tanpa memicu eskalasi, diversification memperkuat hubungan di sektor teknologi, ekonomi, dan diplomasi, sedangkan dual deterrence menjaga stabilitas dengan menahan langkah provokatif dari Taiwan maupun Tiongkok.

Kerangka Freedom of Action Theory menunjukkan bahwa keberadaan celah perjanjian atau loopholes dalam hubungan Amerika Serikat dan Taiwan merupakan strategi sadar yang memungkinkan Amerika Serikat mempertahankan pengaruh tanpa terikat pada kewajiban militer formal. Setelah pembatalan Mutual Defense Treaty pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan akibat pengakuan diplomatik Amerika Serikat terhadap Republik Rakyat Tiongkok, hubungan dengan Taiwan kemudian diatur melalui Taiwan Relations Act yang bersifat domestik dan tidak memuat kewajiban intervensi militer jika Taiwan diserang. Celah legal ini diperkuat melalui Six Assurances tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua yang menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan membatasi penjualan senjata ke Taiwan, tidak akan berkonsultasi dengan Tiongkok, serta tidak akan mengubah posisi terkait status Taiwan. Praktik loopholes terus berlanjut dalam berbagai ketentuan National Defense Authorization Act dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh empat yang meningkatkan kerja sama pertahanan namun tetap tidak membentuk aliansi resmi. Menurut Beckley, strategi seperti ini penting agar negara besar tidak terjebak dalam komitmen pertahanan yang berisiko tinggi dan tidak sejalan dengan kepentingan vital nasional.

Sidestepping dalam hubungan Amerika Serikat dan Taiwan merupakan strategi untuk menghindari komitmen militer formal sambil tetap mempertahankan pengaruh strategis terhadap Taiwan. Pendekatan ini tampak dalam pendirian American Institute in Taiwan sebagai pengganti kedutaan resmi, penggunaan komunikasi ambigu seperti klarifikasi atas pernyataan Presiden Biden, serta pemberian bantuan pertahanan melalui National Defense Authorization Act yang tidak menciptakan kewajiban intervensi langsung. Amerika Serikat juga merespons provokasi Tiongkok dengan memperkuat kerja sama keamanan di kawasan, bukan pengerahan pasukan ke Taiwan. Menurut Yandry Kurniawan, strategi ini didorong oleh dua kepentingan utama Amerika Serikat yaitu menahan ekspansi Tiongkok dan menjaga pengaruh di Indo Pasifik, sembari menghindari risiko perang besar dan dampak ekonomi yang luas. Sejalan dengan pandangan Beckley, sidestepping adalah strategi aktif untuk mempertahankan kebebasan bertindak, memungkinkan Amerika Serikat menjaga stabilitas kawasan tanpa terperangkap dalam kewajiban aliansi formal yang berisiko tinggi.

Amerika Serikat menerapkan strategi diversifikasi sebagai alternatif aliansi formal untuk mempertahankan pengaruhnya terhadap Taiwan tanpa terikat pada komitmen pertahanan yang mengurangi kebebasan bertindak. Melalui Taiwan Relations Act, dukungan kepada Taiwan dibangun bukan dengan perjanjian internasional, tetapi melalui instrumen hukum domestik yang memungkinkan penjualan senjata, bantuan kapasitas pertahanan, dan peningkatan interoperabilitas tanpa kewajiban intervensi militer otomatis. Diversifikasi ini tampak dalam dukungan militer melalui penjualan F-16V, sistem Patriot, dan program keamanan siber; dalam ranah ekonomi melalui investasi strategis seperti pembangunan pabrik semikonduktor TSMC di Arizona; serta dalam ranah diplomatik melalui legislasi yang memperluas ruang gerak Taiwan di komunitas internasional tanpa pengakuan formal. Dengan cara ini, Amerika Serikat dapat memperluas keterlibatan di Taiwan sambil menghindari struktur aliansi seperti Jepang atau Korea Selatan yang

menuntut penempatan pasukan permanen. Keterlibatan Amerika Serikat dalam industri semikonduktor memperkuat ketergantungan bersama yang meningkatkan insentif untuk menjaga stabilitas Selat Taiwan. Melalui kerja sama multilateral dengan Jepang, Australia, dan negara Eropa, Amerika Serikat memperluas dukungan internasional terhadap Taiwan tanpa membentuk aliansi resmi. Dengan menggabungkan dukungan militer, ekonomi, dan diplomatik dalam kerangka yang tidak mengikat, strategi diversifikasi memberi Amerika Serikat kemampuan untuk menjaga status quo, membendung ekspansi Tiongkok, dan tetap mempertahankan ruang manuver strategis yang menjadi inti dari Freedom of Action Theory.

#### 4. Kesimpulan

Melalui pendekatan Freedom of Action Theory, dapat dipahami bahwa keputusan Amerika Serikat untuk tidak membentuk aliansi militer formal dengan Taiwan merupakan strategi sadar dalam menjaga kebebasan bertindak di tengah kompetisi geopolitik Indo Pasifik. Amerika Serikat memilih untuk membangun hubungan yang bersifat lentur melalui instrumen seperti Taiwan Relations Act, lembaga non diplomatik, serta kebijakan strategic ambiguity. Keempat komponen utama dalam teori ini yaitu loopholes, sidestepping, diversification, dan dual deterrence menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak sedang bersikap ragu ragu atau tidak tegas, melainkan sedang memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap memberikan ruang manuver diplomatik. Dengan cara ini, Amerika Serikat dapat terus memperkuat Taiwan melalui dukungan militer, kerja sama teknologi, dan jejaring sekutu internasional, sekaligus menghindari kewajiban intervensi langsung yang biasanya melekat pada aliansi pertahanan resmi. Selain itu, pendekatan ini menjelaskan mengapa Amerika Serikat terlihat tidak maksimal dalam memperkuat hubungan formal, meskipun ancaman dari Tiongkok semakin meningkat. Melalui loopholes, Amerika Serikat mempertahankan dukungan fleksibel tanpa komitmen perjanjian pertahanan. Melalui sidestepping, Amerika Serikat menghindari keterlibatan langsung yang dapat memicu konfrontasi. Melalui diversification, hubungan diperdalam pada sektor teknologi strategis, diplomasi, dan ekonomi. Sementara itu, dual deterrence digunakan untuk menahan Taiwan dan Tiongkok agar tidak melakukan langkah agresif yang memicu konflik besar. Dengan demikian, strategi ini membentuk pola kemitraan strategis tidak resmi yang tetap efektif dalam menjaga stabilitas Selat Taiwan serta mempertahankan peran Amerika Serikat sebagai penyeimbang utama di Asia Timur.

#### Daftar Pustaka

- Rahman, F. (2017). *Analyzing Literary Works through Linguistic Structuralism Approach*. Makassar: Faculty of Cultural Sciences Hasanuddin University.
- Abrar, T. F. (2024). *Taiwan Makin Genting China Kerahkan 100 Jet 9 Kapal Perang*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230918120334-4-473344/taiwan-makin-genting-china-kerahkan-100-jet-9-kapal-perang>
- Abrar, T. F. (2024). *China Taiwan Membara Xi Jin Ping Kerahkan 21 Jet Tempur*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240527134919-4-541470/china-taiwan-membara-xi-jinping-kerahkan-21-jet-tempur>
- BBC News. (2021). *Taiwan says dozens of Chinese planes entered defence zone*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-58771369>

- Beckley, M. (2017). The myth of entangling alliances: Reassessing the security risks of U.S. defense pacts. *International Security*, 39(4), 7–48. [https://doi.org/10.1162/ISEC\\_a\\_00220](https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00220)
- Beckley, M., & Wohlforth, W. (2015). The myth of entangling alliances. *International Security*, 39(4), 7–48. <https://doi.org/10.1162/ISEC>
- Brunnstrom, D., & Hunnicutt, T. (2022). *Biden says US forces would defend Taiwan if China invades*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/biden-says-us-forces-would-defend-taiwan-event-chinese-invasion-2022-09-18/>
- CNN. (2022, May 23). *Biden says US would defend Taiwan if China invades*. <https://www.cnn.com/2022/05/23/politics/biden-taiwan-defense-china/index.html>
- Congressional Research Service. (2019). *China's actions in South and East China Seas: Implications for U.S. interests — Background and issues for Congress*.
- Department of State. (2019). *A free and open Indo-Pacific: Advancing a shared vision*. <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Free-and-Open-Indo-Pacific-4Nov2019.pdf>
- Diyanto, D. R. (2024). Hubungan strategis Amerika Serikat dan Taiwan di bidang keamanan guna mendukung kekuatan militer Taiwan. *Diplomacy and Global Security Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2909>
- Fatmawati, F., Kenepri, K., & Darma, M. (2023). Strategi balancing Taiwan terhadap Tiongkok dalam merespon reunifikasi. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 3830–3839.
- Fang, S., Johnson, J. C., & Leeds, B. A. (2014). To concede or to resist? The restraining effect of military alliances. *International Organization*, 68(4), 775–809. <https://www.jstor.org/stable/43283279>
- FAPA. (2023). *The Six Assurances*. <https://fapa.org/six-assurances/>
- Focus Taiwan. (2023). *Military releases new civil defense handbook amid backlash*. <https://focustaiwan.tw/politics/202306130007>
- Forum on the Arms Trade. (2024). *U.S. arms sales to Taiwan*. <https://www.forumarmstrade.org/ustaiwan.html>
- Hajiansyah, P. P., & Maulana, I. (2022). Intervensi Amerika Serikat apabila Republik Rakyat Tiongkok menginvasi Taiwan. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4128011>
- Haverland, J. B., & M. (2012). Designing case studies explanatory approaches in small-N research. *Journal of Chemical Information and Modeling (1st ed.)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- He, K., & Li, M. (2020). Understanding the dynamics of the Indo-Pacific: US-China strategic competition, regional actors, and beyond. *International Affairs*, 96(1), 1–7. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz242>
- Hesti Rosdiana, & Saharani, A. (2024). Kerja sama Taiwan-Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman China periode 2016–2020. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(2), 295–313. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.367>

- Kih, J. (2019). Capability building and alliance cohesion: Comparing the US-Japan and US-Philippines alliances. *Australian Journal of International Affairs*, 0(0), 1–22. <https://doi.org/10.1080/10357718.2019.1685935>
- Kim, H. W. (2011). Substantiating the cohesion of the post-Cold War US-Japan alliance. *Australian Journal of International Affairs*, 65(3), 340–359. <https://doi.org/10.1080/10357718.2011.567442>
- Kim, T. (2016). US alliance obligations in the disputes in the East and South China Seas. <https://www.jstor.org/stable/resrep14540.5>
- Kirana, Y. S., Nizar, M., & Luerdi. (2025). Perubahan pendekatan Amerika Serikat terhadap One China Policy di era Presiden Donald Trump. *Glocal: Jurnal Kajian Global Dan Lokal*, 2(1), 1–17. <https://glocal.fisip.unila.ac.id/index.php/glocal/article/view/111>
- Krause, V., & Singer, D. (1982). Minor powers, alliances, and armed conflict. 12–19.
- Krauthammer, C. (2002). The unipolar moment. *The National Interest*, 70(1), 5–18. <https://doi.org/10.2307/20044692>
- Lamont, C. (2015). *Research methods in international relations*. Sage Publishing.
- Levy, J. S. (1981). Alliance formation and war behavior: An analysis of the Great Powers, 1495–1975.
- Lindsay, M. (2022). *Why China-Taiwan relations are so tense*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/background/china-taiwan-relations-tension-us-policy-biden>
- Mirza, F. I. (2018). Penurunan kerja sama militer Amerika Serikat - Filipina menghadapi Tiongkok di Asia Tenggara periode 2016–2019 (Tesis, Universitas Indonesia).
- Nuechterlein, D. E. (1976). National interests and foreign policy: A conceptual framework for analysis and decision-making. *British Journal of International Studies*, 2(3), 246–266. <https://doi.org/10.1017/S0260210500116729>
- Shusen, W. (2022). Adjustments in U.S. arms sales policy toward Taiwan: Characteristics, trends, and implications. *Collaborative Innovation Center of South China Sea Studies*.
- Taiwan Relations Act, Pub. L. No. 96–8, 93 Stat. 14 (1979). <https://www.congress.gov/bill/96th-congress/house-bill/2479>
- U.S. Congress. (2024). *National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024*. <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670>
- U.S. Department of Commerce. (2023). *TSMC investment in Arizona*. <https://www.commerce.gov/news/blog/2023/05/tsmc-investment-american-semiconductor-industry>
- U.S. Department of Defense. (2016). *Freedom of navigation report for fiscal year 2016*.
- U.S. Department of Defense. (2018). *Annual freedom of navigation report*. <https://policy.defense.gov/Portals/11/Documents/FY18> DoD Annual FON Report (final).pdf?ver=2019-03-19-103517-010

- U.S. Department of Defense. (2023). *U.S. strengthening deterrence in Taiwan Strait*. <https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3531094/us-strengthening-deterrence-in-taiwan-strait/>
- VOA Indonesia. (2024). *Biden setuju bantuan pertahanan 567 juta untuk Taiwan*. <https://www.voaindonesia.com/a/biden-setujui-bantuan-pertahanan-567-juta-untuk-taiwan/7804393.html>
- VOA Indonesia. (2024). *China kerahkan 153 pesawat dalam latihan perang, Taiwan soroti risiko bagi kawasan*. <https://www.voaindonesia.com/a/china-kerahkan-153-pesawat-dalam-latihan-perang-taiwan-soroti-risiko-bagi-kawasan/7822874.html>
- Walt, S. M. (1985). Alliance formation and the balance of world power. *International Security*, 9(4), 3–43.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Ward, A., & McLeary, P. (2021). *The Quad alliance and balancing against China*. Defense News. <https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2021/09/24/the-quad-alliance-and-balancing-against-china/>
- Weismann, H. (2017). *How vague are international agreements? Introducing a method for systematic comparison*. Technische Universität Darmstadt.
- WESLEY, M. (Ed.). (2017). *Global allies*. ANU Press.
- Widyasari, S., Nurdin, I., & Sari, S. (2024). Kerjasama pertahanan Taiwan - Amerika Serikat menghadapi kebijakan luar negeri Tiongkok One China Policy 2018–2023. *Diplomacy and Global Security Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2882>
- Yogianto, D. (2025). Intervensi Amerika Serikat dalam konflik Taiwan-Tiongkok tahun 2022–2024. *Diplomacy and Global Security Journal*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i1.3486>